

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu Propinsi, Kabupaten atau Kota. Definisi pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi. Kontribusi sektor pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *Dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran (Mudrajat, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2000; Mudrajat, 2000;)

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi,

komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antarwilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Terdapat pula beberapa teori penting lainnya mengenai pembangunan ekonomi wilayah (regional) di antaranya menurut aliran Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Sumbangan pemikiran aliran Neo Klasik tentang teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang gradual
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif
- 4 Aliran Neo Klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan (perkembangan).

Selanjutnya Todaro (1997) menyatakan bahwa, terdapat beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu klasifikasinya adalah faktor fisik dan manajemen. Secara spesifik disebutkan terdapat tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Faktor utama lainnya adalah kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis.

Perroux yang terkenal dengan teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Perroux, 1988 dalam Mudraja 2002).

Selanjutnya Kuznets (Todaro, 2000), yang telah berjasa dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa, pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahapan berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian terkenal secara luas sebagai konsep kurva U- terbalik dari Kuznets.

Di sisi lain Hoover (1977), menerangkan bahwa teori pertumbuhan regional berbasis ekspor merupakan beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic*, dengan kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekwensi dari pembangunan menyeluruhnya.

Demikian pula menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non-basic* hanyalah yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa

perseorangan, produksi input untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*.

Menurut Bachrul (2004), dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Menurut model ini *multiplier* basis ekonomi dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan.

B. Otonomi Daerah

Van der Pot (dikutip oleh Riani, 2012) mengungkapkan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya dalam proses penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian yang merupakan hakikat dari otonomi itu sendiri.

Sementara itu Marzuki (1999) berpendapat bahwa kebebasan dan kemandirian daerah belumlah cukup sehingga harus diwujudkan dalam format otonomi yang seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan format otonomi seluas-luasnya adalah penyerahan sebanyak-banyaknya wewenang yang menyangkut urusan daerah agar menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Pada dasarnya, prinsip otonomi daerah harus mencerminkan tiga hal, yaitu (1) harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, (2) dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, (3) harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (Andi, 2007). Jadi dalam konteks otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Artinya daerah otonom tetap berhak menjalankan wewenang dan mengurus urusannya tanpa mengabaikan kepentingan negara atau merusak bingkai dasar kesatuan negara. Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami otonomi daerah maka perlu ada perundang-undangan yang mengatur definisi serta cakupan otonomi daerah secara jelas dan sah. Undang-undang yang ada tidak hanya menjelaskan tentang makna dan arti otonomi saja melainkan mampu memberi batasan kewenangan dan urusan daerah.

C. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Telah diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan

potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari faktor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusia yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*)

D Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah. Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial. Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-

sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*.

Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan. Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

E. Teori Basis Kegiatan Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan basis dan kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam

batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) di mana setiap perubahan mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian regional.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

1. Menggunakan Asumsi-Asumsi Atau Metode Arbitrer Sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian diekspor atau dijual kepada lokal atau keduanya.

2. Metode *Location Quotient* (LQ).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Dengan dasar pemikiran *economic base* kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

(2.1)

$$LQ = (L_{ij}/L_j) / (N_{ip}/N_p)$$

Keterangan:

L_{ij} = Nilai tambah sektor i di daerah j (Kabupaten/Kota)

L_j = Total nilai tambah sektor di daerah j

N_{ip} = Nilai tambah sektor i di daerah p (Provinsi/ Nasional)

N_p = Total nilai tambah sektor di p

P = Provinsi /Nasional

L_{ij}/L_j = Prosentasi employment regional dalam sektor i

N_{ip}/N_p = Prosentase employment nasional dalam sektor

Atau melalui formulasi berikut:

$$LQ = R/VR + VI/V$$

(2.2)

Di mana :

$V1R$ = Jumlah PDRB suatu sektor kabupaten / kota

VR = Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/kota

$V1$ = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat provinsi

V = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat provinsi

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

Jika $LQ > 1$, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten /kota lebih tinggi dari tingkat provinsi

Jika $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan di tingkat provinsi

Jika $LQ < 1$, adalah merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat Spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi.

Penggunaan LQ ini sangat sederhana dan banyak digunakan dalam analisis sektor-sektor basis dalam suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai suatu kelemahan karena berasumsi bahwa permintaan di setiap daerah adalah identik dengan pola permintaan nasional, bahwa produktivitas tiap tenaga kerja di setiap daerah sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap tenaga kerja dalam industri nasional, dan bahwa perekonomian nasional merupakan suatu perekonomian tertutup. Sehingga perlu disadari bahwa: [a] Selera atau pola konsumsi dan anggota masyarakat itu berbeda-beda baik antar daerah maupun dalam suatu daerah. [b] Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang untuk setiap daerah berbeda. [c] Bahan keperluan industri berbeda antar daerah.

Walaupun teori ini mengandung kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisahkan sektor-sektor basis-bukan basis.

Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek .

F. Analisis *Shift-Share*

Pada dasarnya analisis ini membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi digunakan analisis *Shift- Share*.

Menurut Bendavid - Val (1983), Hoover (1984) (Lihat Prasetyo, 1993: 44) teknik ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian nasional.

Dengan demikian dapat temukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional. Lincolyn Arsyad (1997: 290) dan Latif Adam (1994), mengemukakan bahwa analisis *shift-share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari

perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Teknik *shift-share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selamakurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasional (N), bauran industri M dan keunggulan kompetitif (C) (Bendavid-Val, 1991).

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift atau bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau regional share. Itulah sebabnya disebut teknik *shift-share*.

Berikut terdapat beberapa rumusan analisa *shift share* antara lain teknik analisa *shift – share* Klasik dengan formulasi sebagai berikut :

Untuk industri atau sektor i di wilayah j :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (2.1)$$

Bila analisis itu diterapkan kepada kesempatan kerja (employment), E, maka :

$$D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij} \quad (2.2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \quad (2.3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n) \quad (2.4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (2.5)$$

Di mana : r_{in} , r_n dan r_{ij} mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju

pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai :

$$r_{ij} = (E^*_{ij} - E_{ij}) / E_{ij} \quad (2.6)$$

$$r_{in} = (E^*_{in} - E_{in}) / E_{in} \quad (2.7)$$

$$r_n = (E^*_n - E_n) / E_n \quad (2.8)$$

Di mana :

E_{ij} = tenaga kerja disektor i di wilayah j

E_{in} = kesempatan kerja disektor i ditingkat nasional, dan

E_n = kesempatan kerja nasional, semuanya diukur pada suatu tahun dasar.

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3), bauran industri (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi sesuatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan *shift-share* untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = E_{ij}r_n + E_{ij}(r_{in} - r_n) + E_{ij}(r_{ij} - r_{in}) \quad (2.9)$$

Dari persamaan di atas membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis.

Dalam penggunaan analisis *shift-share* di atas (model Klasik) harus mempertimbangkan keterbatasan teoritik yang ada. Menurut Prasetyo Soepono(1993) mencatat empat keterbatasan teoritik dari analisis *shift-share* ini yaitu:

- 1 Persamaan *shift-share* adalah suatu persamaan identitas sehingga tidak mempunyai implikasi- implikasi keperilaku. Karena itu metode bukan untuk menjelaskan dan tidak analitik tetapi hanya mencerminkan suatu sistem akunting.
- 2 Pertumbuhan industri pada suatu wilayah dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan tingkat nasional. Gagasan ini sangat sederhana sehingga dapat mengaburkan sebab- sebab pertumbuhan suatu wilayah.

3 Arti ekonomi dari dua komponen *shift* tidak dikembangkan dengan baik, sehingga tidak mudah dibedakan /dipisahkan.

4 Analisis *shift-share* mengasumsikan bahwa semua barang yang dijual secara nasional. Asumsi ini kurang realistis karena suatu barang yang bersifat lokal tidak bersaing dengan barang sejenis yang dihasilkan wilayah lain sehingga barang yang bersangkutan tidak memperoleh bagian dari permintaan agregat.

Selanjutnya Estaban Marquillas (E-M) tahun 1972 (Prasetyo, 1993) berusaha memodifikasi analisis *shift-share* ini sehingga terlihat pengaruh persaingan yang meliputi pengaruh persaingan dan pengaruh alokasi yang pada nantinya dapat menunjukkan keunggulan kompetitif dan sektor spesialisasi. Persamaan S-S yang direvisi itu mengandung suatu unsur baru, yaitu *homothetic employment* di sektor i di wilayah j, diberi notasi E'_{ij} dan dirumuskan sebagai berikut :

$$(E'_{ij} = E_j (E_{in} / E_n) \quad (2.10)$$

E'_{ij} di definisikan sebagai *employment* atau *output* atau pendapatan atau nilai tambah yang dicapai sektor i di wilayah j bila struktur kesempatan kerja di wilayah itu sama dengan struktur nasional. Dengan mengganti kesempatan kerja nyata, E_{ij} , dengan *homothetic employment*, E'_{ij} , persamaan (5) diubah menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (2.11)$$

C'_{ij} mengukur keunggulan atau ketidak-unggulan kompetitif di sektor i di (perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya pengaruh alokasi atau *allocation effect* sektor i di wilayah j (A_{ij}) dirumuskan sebagai berikut :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_{in}) \quad (2.13)$$

Persamaan (12) di atas menunjukkan bahwa bila suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Maksudnya efek alokasi, A_{ij} itu dapat positif atau negatif. Efek alokasi positif mempunyai dua kemungkinan: pertama, $E_{ij} - E'_{ij} < 0$ dan $r_{ij} - r_{in} < 0$ dan kedua, $E_{ij} - E'_{ij} > 0$ dan $r_{ij} - r_{in} > 0$. sebaliknya efek alokasi yang negatif mempunyai dua kemungkinan yang berkebalikan dengan efek alokasi positif tersebut diatas.

Jadi modifikasi E-M terhadap analisis *shift-share* adalah :

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_n) + E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) + (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_{in}) \quad (2.13)$$

Modifikasi selanjutnya terhadap analisis S-S adalah dikemukakan oleh Arcelus (1984) adalah dengan memasukkan sebuah komponen yang merupakan dampak pertumbuhan inheren suatu wilayah atas perubahan (kesempatan kerja) wilayah.

Modifikasi ini mengganti C_{ij} dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan sebuah komponen bauran industri regional sebagai sisanya. Penekanan Arcelus terletak pada komponen kedua yang mencerminkan adanya *agglomeration economies* (penghematan biaya persatuan karena kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha).

Untuk menjelaskan regional *growth effect* berikut ini dirumuskan sebagai berikut

$$R_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_n) \quad (2.14)$$

Di mana :

E'_{ij} = *homothetic employment* sektor i di wilayah j

E_{ij} = *employment* disektor i di wilayah j

r_j = laju pertumbuhan wilayah j

r_n = laju pertumbuhan nasional

Selanjutnya rumus berikut :

$$R_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_j) - (r_{in} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij}) [(r_{ij} - r_j) - (r_{in} - r_n)] \quad (2.15)$$

Menggambarkan komponen bauran industri regional yang dimodifikasi oleh Arcelus.

G. Tipologi Ekonomi Regional

Tipologi klassen merupakan sebuah alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian kabupaten pemekaran di Provinsi Lampung. Analisis tipologi klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal:2008) :

a. Kuadran I : Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan sektor dalam PDRB kabupaten pemekaran (s_i) di atas laju pertumbuhan sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (s) dan Nilai kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten pemekaran (ski) lebih besar dari nilai kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (sk). Klasifikasi ini digambarkan dengan $s_i > s$ dan $ski > sk$

b. Kuadran II : Sektor yang maju tapi tertekan (*stagnant sector*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan sektor dalam PDRB kabupaten pemekaran (si) lebih kecil daripada laju pertumbuhan sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (s) tetapi memiliki Nilai kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten pemekaran (ski) lebih besar dari nilai kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (sk).

Klasifikasi ini digambarkan dengan $si < s$ dan $ski > sk$

c. Kuadran III : Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan sektor dalam PDRB kabupaten pemekaran (si) lebih besar daripada laju pertumbuhan sektor dalam PDRB provinsi Lampung (s) namun memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten pemekaran (ski) lebih kecil dari nilai kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (sk). Klasifikasi ini digambarkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$

d. Kuadran IV : Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) adalah sektor yang mempunyai laju pertumbuhan sektor dalam PDRB kabupaten pemekaran (si) lebih rendah daripada laju pertumbuhan sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (s) sekaligus memiliki Nilai kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten pemekaran (ski) lebih rendah pula dari nilai kontribusi sektor dalam PDRB Provinsi Lampung (sk). $si < s$ dan $ski > sk$

Tabel 3 Tipologi Daerah

Kontribusi sektor (sk) Laju pertumbuhan(s)	($ski > sk$)	($ski < sk$)
($si > s$)	Kontribusi tinggi dan Pertumbuhan sektor tinggi	Kontribusi rendah dan pertumbuhan sektor tinggi
($si < s$)	Kontribusi tinggi dan pertumbuhan rendah	Kontribusi rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber : Sjafrizal (2008)

Keterangan :

s = Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Lampung

sk = Rata-rata kontribusi sektor Provinsi Lampung

si = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i)

ski = Kontribusi sektor kabupaten/kota yang diamati (i)

H. Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Dalam perencanaan Wilayah dan Kota terutama untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial alat analisis yang sering digunakan antara lain: analisis *Location Quotient* digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan dalam wilayah studi dibandingkan dengan wilayah referensinya, dan analisis *Shift-Share* adalah melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (wilayah referensi) maupun skala yang kecil (wilayah studi).

Kedua alat tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi wilayah yang potensial, meskipun dalam melakukan analisis dengan kedua alat tersebut harus mempunyai pola yang sama terutama dalam melakukan *overlay*.

Dalam analisis tersebut terdapat dua rasio pertumbuhan yaitu :

1. Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS), dengan formulasi matematis yang

$$\text{digunakan adalah } RPS = \frac{DEj}{EiR} \div \frac{DEiR}{EiR} \quad (2.1)$$

2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR), Formulasi yang digunakan

$$\text{adalah : } RPr = \frac{DEiR}{EiR} \div \frac{DER}{ER} \quad (2.2)$$

Di mana :

DE_{ij} = Perubahan pendapatan kegiatan I di Kabupaten pemekaran pada tahun awal analisis

DER = Perubahan PDRB di Propinsi Lampung

DE_{iR} = Perubahan pendapatan kegiatan I di Propinsi Lampung

$E_{iR}(t)$ = Perubahan pendapatan kegiatan I di Kabupaten pemekaran

ER = PDRB wilayah referensi

Identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan tersebut ditunjukkan melalui *overlay* antara Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan *Location Quotient* (LQ). Koefisien dari ketiga komponen tersebut kemudian disamakan satuannya dengan diberikan notasi positif (+) yang berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu dan Negatif (-) berarti kurang dari satu. RPR bernetasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernetasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sedangkan LQ bernetasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi.

Tabel 4 Ringkasan Analisis MRP

Notasi	Keterangan Analisis
RPr +	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total di wilayah referensi
RPS +	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi.
LQ +	Bermakna bahwa kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi.